

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEMPAT
PARKIR DI KABUPATEN GRESIK
(Studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan Alun-alun Gresik)

SKRIPSI



Oleh :

Firasidah Hasnah

0941010036

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA
2014

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI
KABUPATEN GRESIK**

**(Studi tentang parker non berlangganan di tepi jalan umum kawasan Alun-
alun Gresik)**

Disusun Oleh :

FIRASIDAH HASNAH
NPM. 0941010036

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001

Mengetahui,

DEKAN



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEMPAT
PARKIR DI KABUPATEN GRESIK**
(Studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan alun-alun Gresik)

Disusun oleh :

Erasidah Hasnah
NPM. 0941010036

Telah Dipertahankan Diluapkan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 02 Januari 2014

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001

Tim Penguji

1.



Dra. Susi Hardjati, M.AP
NIP. 196902101993032001

2.



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001

3.



Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

Mengetahui



DEWI H. Sibarwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

**IMPLEMENTASI KEBLIKAAN PENGELOLAAN TEMPAT
PARKIR DI KABUPATEN GRESIK**

(Studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan alun-alun Gresik)


Nama Mahasiswa : Firasidah Hasnah
NPM : 0941010036
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik

Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Telah Direvisi dan Disahkan
Pada tanggal

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Susi Hardati, M.AP
NIP. 196902101993032001



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001



Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KABUPATEN GRESIK (Studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan Alun-alun Gresik)”.’.

Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban bagi kami mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khusus fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam jurusan Administrasi Publik dalam rangka memenuhi tujuan akademik guna melengkapi sebagian syarat untuk menempuh ujian skripsi. Hasil dari penulisan skripsi ini bukanlah kemampuan dari penulis semata. Namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik dalam bentuk bantuan tenaga, pikiran, waktu, moril, maupun materil serta bantuan dalam bentuk yang lain.

Pada dasarnya bertujuan untuk dapat mempermudah dan mempercepat proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Ertien rining N, Msi selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. Atas terselesainya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini kiranya tidaklah terlalu berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh :

1. Ibu Hj. Suparwati, Dra., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Dr. Lukman Arif, M.Si. Selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Dra. Susi Hardjati, M.AP. selaku sekretaris program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Kedua Orang Tuaku, yang selalu memberikan dorongan dan bantuan baik spiritual dan materil. Kasih sayang dan perhatian yang beliau berikan kepada penulis tidak dapat tergantikan oleh apapun. Terima kasih ayah dan ibu, semoga Allah SWT selalu melindungi beliau berdua.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Sebagai bahan acuan bagi penulisan yang akan datang. Akhir kata semoga dengan terselesainya proposal skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi penulis maupun bagi pihak fakultas dan para pembaca pada umumnya.

Surabaya 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Pengertian Implementasi	15
2.2.1.1 Implementasi Kebijakan	16
2.2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan	17
2.2.1.3 Model-model Implementasi Kebijakan	20

2.2.1.4	Faktor Keberhasilan & Kegagalan Dalam Implementasi Kebijakan	24
2.2.2	Kebijakan Publik	24
2.2.2.1	Pengertian Kebijakan publik	24
2.2.2.2	Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan Publik	24
2.2.2.3	Aktor-aktor dan Pelaku Pembuat kebijakan publik	26
2.2.2.4	Aktor yang Berperan Dalam Proses Kebijaksanaan	29
2.2.2.5	Sifat Kebijakan Publik	32
2.2.3	Pengertian Peraturan daerah	33
2.2.4	Kerangka Berpikir	36
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Fokus Penelitian	39
3.3	Lokasi Penelitian	41
3.4	Sumber dan Jenis Data	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data	43
3.6	Metode Analisa Data	44
3.7	Keabsahan data	47
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	51
4.1.1	Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	51
4.1.2	Sektor/ Sub Sektor	52
4.1.3	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	52

4.1.4	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	53
4.1.5	Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	56
4.1.5.1	Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.....	56
4.1.5.2	Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.....	56
4.1.6	Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan	57
4.1.7	Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Gresik.....	59
4.1.8	Dasar Hukum	60
4.1.9	Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	60
4.1.10	Gambaran Umum Parkir di Kabupaten Gresik.....	63
4.1.11	Gambaran Umum Alun-alun Gresik	68
4.2	Hasil Penelitian	69
4.3	Pembahasan	83
4.3.1	Pengelolaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum	83
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	37
Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Negri Sipil Dinas Perhubungan kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Negri Sipil Dinas Perhubungan kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Pendidikan	61
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Negri Sipil Dinas Perhubungan kabupaten Gresik Berdasarkan Pangkat/Golongan	62

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI
KABUPATEN GRESIK**
(Studi Tentang Parkir Non Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Kawasan
Alun-Alun Gresik)

ABSTRAK

Firasidah Hasnah 2013. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir Di Kabupaten Gresik (Studi Tentang Parkir Non Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Gresik).

Penelitian ini didasarkan fakta bahwa sering ada pengaturan parkir yang mengganggu arus lalu lintas sehingga fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah mengatasi masalah parkir dipertanyakan. Terdapat oknum juru parkir yang menggunakan tepi jalan umum di tempat keramaian (kawasan alun-alun Gresik) terkadang kurang memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tempat umum.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah alun-alun Kabupaten Gresik. Sumber data penelitian ini diperoleh dari key informan, tempat peristiwa dan lokasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir umum di kawasan Alun-alun Gresik belum terimplementasi sepenuhnya karena masih terdapat pelanggaran yang dilakukan petugas parkir dilapangan. Dalam melayani masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir belum terimplementasi sepenuhnya karena batas parkir yang seharusnya digunakan itu terkadang ada dan terkadang tidak ada. Menata kendaraan yang di parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas, masih belum terimplementasi dikarenakan petugas dilapangan masih adanya petugas parkir yang menata kendaraan di tepi jalan umum melebihi satu shap/ satu baris. Menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan yang diparkir sudah terimplementasi dengan baik. Penggunaan tanda bukti (karcis) yang telah di porporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset petugas parkir dalam menggunakan tanda bukti (karcis) belum terimplementasi secara maksimal karena masih adanya petugas parkir yang menjadikan tanda bukti (karcis) menjadi satu fungsi saja. Karcis yang digunakan sudah sedah sesuai tetapi masih ada petugas yang menggunakan tanda bukti (karcis) menjadi satu fungsi saja. Dalam pembayaran parkir sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, pengelolaan parkir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan sehingga pemerintah daerah harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut sistem pemecahan kekuasaan secara

vertikal suatu negara dikenal dengan istilah desentralisasi yang membagi kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Upaya penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus sebagai pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
5. mengendalikan sumber-sumber yang dimiliki dalam proses produktif.

Dalam perkembangan Kota Gresik dari tahun ke tahun semakin banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Kota Gresik yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat terutama di alun-alun Gresik maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak

selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi.

Dalam pertimbangan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 dalam Bab 2 Pasal 3 Nomor 2 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut timbul permasalahan dalam pengelolaan yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Kota Gresik harus berinisiatif untuk mengatur sistem pengelolaan perparkiran yang lebih baik. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan di daerah tertentu terutama pada kawasan Alun-alun Gresik dikarenakan adanya perilaku pengelola jasa parkir yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan daerah yang mengatur parkir di tepi jalan umum adalah peraturan daerah Kabupaten Gresik No 4 tahun 2011 bab 2 pasal 3 no 2 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota Gresik. Dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir tersebut dalam peraturan Daerah Kabupaten Gresik. Dalam Peraturan Daerah No 4 tahun 2011, pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, sedangkan tempat parkir adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum

maupun di parkir khusus . Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan.

Salah satu tujuan dari adanya perparkiran ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat. Retribusi pembayaran parkir juga memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah, yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Hal tersebut menyiratkan bahwa peran penting pemerintah lokal dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan yang mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mewakili semua pihak dan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, maka diharapkan adanya kondisi yang sehat bagi perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun dimensi lainnya.

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya lebih meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perparkiran yang efektif. dalam pemberian pelayanan pengelolaan perparkiran yang efektif pada masyarakat dimana agar masyarakat tidak merasa dirugikan dalam menggunakan jasa parkir yang telah disediakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Dengan adanya kegiatan yang banyak mengundang masyarakat secara luas untuk datang d Alun-alun Kota Gresik. Karena setiap harinya banyak pedagang kaki lima yang berjualan di dalam alun-alun, terdapat tempat makan (pujasera), dan tempat taman bermain untuk anak-anak, dll .Hal ini tentunya berdampak pada banyaknya parkir di tepi jalan umum sekitar alun-alun yang terkadang mengganggu arus lalu lintas.

Kondisi tempat parkir



Berdasarkan observasi awal dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Agustus 2013 di Alun-alun Kabupaten Gresik. Menemukan fakta masih ada

beberapa kesalahan yang dilakukan oleh petugas parkir dilapangan dalam hal pemberian tanda bukti pembayaran (karcis) yaitu dengan menjadikan karcis lebih dari satu kali pemakaian dan dijadikan satu fungsi saja, terkadang petugas melebihi batas parkir yang sudah di sediakan, masih kurang mampu untuk menata kendaraannya dengan rapi disaat pengguna jasa parkir terlalu banyak sehingga mengganggu arus lalu lintas.

Terdapat oknum juru parkir yang menggunakan tepi jalan umum di tempat keramaian (kawasan alun-alun Gresik) terkadang kurang memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tempat umum.

Kebijakan parkir mempunyai mempunyai tujuan untuk terciptanya ketertiban perparkiran. Semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban perparkiran maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan ketertiban pengelolaan perparkiran kepada pemakai jasa parkir secara maksimal yaitu melalui peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2004 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada BAB II pasal 3 Nomor 2 yang menjelaskan pengelola parkir dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk :

- a. melayani masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir
- b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

- c. Menjaga keberhasilan dan keamanan kendaraan yang diparkir
- d. Menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- e. Menerima pembayaran parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan kecuali bagi yang ikut parkir berlangganan.

Kebijakan parkir di Kabupaten Gresik yang sesuai dengan Perda no 4 tahun 2011 menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis pelayanan tempat parkir, meliputi : 1). Parkir di tepi jalan umum, 2). Parkir di tempat khusus parkir.

Hal diatas tanpa disadari telah merugikan masyarakat pengguna jasa parkir non berlangganan di tepi jalan umum kawasan alun-alun Gresik. Ketidak efektifan yang dilakukan oleh juru parkir ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berkopetensi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan perparkiran, sehingga para juru parkir dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Melihat fenomena dan permasalahan diatas dalam penerapan implementasi kebijakan parkir umum, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam tentang pelaksanaan parkir umum yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik dengan judul penelitian

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEMPAT

PARKIR DI KABUPATEN GRESIK (Studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan Alun-alun Gresik).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengangkat permasalahan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah :
 “Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Gresik (studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan Alun-alun Gresik) ?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Didalam melakukan suatu aktivitas tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, demikian juga penelitian ini dalam rangka penyusunan skripsi mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik (studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan Alun-alun Gresik).

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta ilmu mengetahui implementasi kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik (studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan Alun-alun Gresik) dan hal ini sangat berguna bila terjun ke masyarakat.

2. Bagi Instansi

Memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik serta sebagai masukan bagi Dinas

Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai pihak yang berkompetensi dalam pelaksanaan parkir umum di tepi jalan.

3. Bagi Universitas

Sebagai tambahan referensi dalam perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur pada umumnya.